

***POLICY IMPLICATION OF SINGLE CANDIDATES IN REGIONAL HEAD ELECTION ON VOTER PARTICIPATION IN TASIKMALAYA DISTRICT***

**Engkus<sup>1</sup>Nanang Suparman<sup>2</sup>, Fadjar Trisakti<sup>3</sup>,Firda Lestari<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung.  
No. HP : <sup>1</sup>082216266677, <sup>2</sup>087722594013, <sup>3</sup>081802041668, <sup>4</sup>082316782030  
E-mail: <sup>1</sup>[ekustyana16@gmail.com](mailto:ekustyana16@gmail.com), <sup>2</sup>[n.suparman69@gmail.com](mailto:n.suparman69@gmail.com),  
<sup>3</sup>[fajr3sakti@gmail.com](mailto:fajr3sakti@gmail.com), <sup>4</sup>[firdalestari@gmail.com](mailto:firdalestari@gmail.com).

***Abstract***

*The main problem in this study is that voter participation in the election to the regions in Tasikmalaya Regency declined. This is possible because of the absence of candidates who have great potential to compete with the single candidate, the existence of a legal vacuum (Rechtvacuum) with weak regulations regarding regional elections followed by single candidates which have implications for planned delays in the election, political. This study uses a quantitative approach with Associative method. The calculation results obtained by calculating the dimensions of size and purpose, resources, character of the implementing agent, disposition, communication, and environment of the Single Candidate Determination Policy in the Election of Regional Heads on Voter Participation in Tasikmalaya District have a significant influence. Thus it is concluded that there are still not optimal indicators from the dimensions of policy implementation such as the character of the implementing agency that directly affects participation of the community, then in communication and the way the implementer gives an attitude in accepting the results of implementation that are not in accordance with what the community feels.*

**Keywords:** Policy, Constitutional Court, Single Candidate, Community Participation

## A. PENDAHULUAN

Konsepsi administrasi publik berasal dari ilmu politik, yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ilmu politik di sini bukan hanya dijadikan untuk mencapai kekuasaan, namun dijadikan juga sebagai pengabdian dalam kehidupan bernegara. Bentuk pengabdian kepada negara diantaranya adalah bentuk kedaulatan rakyat kepada negara dengan cara berpartisipasi dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum. Pemilihan umum dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 menjadi menarik untuk dikaji sebagai gelombang awal dalam karena dilaksanakan serentak dan akan dilakukan selanjutnya di Tahun 2017 dan 2018. Dalam Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah, untuk kepala provinsi disebut dengan gubernur dan wakilnya adalah wakil gubernur, untuk kepala daerah kabupaten/kota disebut bupati/walikota dan begitupun wakilnya. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggunakan asas desentralisasi, karena pemerintah daerah sendirilah yang mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh daerah itu sendiri. Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Daerah otonomi diberikan kewenangan yang lebih untuk mengembangkan daerahnya sendiri.

Tahun 2015, gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung digelar secara serentak pada bulan Desember tahun 2015 pula,

Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada Tahun 2005. Semenjak Tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan Pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah. Namun demikian, ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi pun mulai diimplementasikan di Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Terkait dengan pemilihan kepala daerah, ada beberapa hal yang melatar belakangi pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku pada Tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, diantaranya masalah terkait pencalonan tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah, yang ikut meramaikan kompetisi pilkada. Sementara itu calon tunggal tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada karena didalam undang-undang tersebut minimal diikuti oleh dua pasangan calon.

Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (*Rechtvacum*) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon semata karena merasa akan menghabiskan sumber daya, biaya, energi, waktu, dan sebagainya, secara sia-sia karena demikian kuatnya elektabilitas petahana.

Begitu sulit dan rumitnya pemenuhan persyaratan bagi calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah mengakibatkan harapan untuk tercapainya formula “setidaknya dua pasangan calon” juga sulit tercapai. Mengenai calon tunggal ini terjadi di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya. Padahal masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memimpin daerahnya bisa mencalonkan pada pemilukada serentak ini, karena setiap warga negara yang punya hak memilih juga mempunyai hak dipilih serta memiliki kesempatan yang sama

dalam pemerintahan yang telah terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3).

Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa cukup dengan memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih setuju atau tidak setuju. Dengan putusan yang telah ada yaitu putusan dengan nomor 100/PUUXIII/2015, Dengan adanya Keputusan Mahkamah Kostitusi tentang dibolehkannya calon tunggal dalam pemilukada khususnya di kabupaten Tasikmalaya, melahirkan kurang pahamiannya masyarakat akan hal tersebut. Karena masyarakat harus langsung mengubah kebiasaan memilih dari yang awalnya mencoblos foto calon, sekarang hanya dengan memberikan suara “Setuju” dan “Tidak Setuju”. Dengan hal inilah pihak Komisi Pemelihan Umum Daerah (KPUD) berusaha keras memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang hal tersebut. Namun hal ini juga mengakibatkan respon/antusiasme masyarakat berlainan dalam berpartisipasi pemilukada tahun ini. Karena baru kali ini terjadi hal seperti ini. Tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan keputusan seperti ini, karena calon ini telah menjadi bupati di periode sebelumnya dan mungkin hasil yang dirasakannya tidak sesuai. Namun, ada juga yang setuju karena mereka menganggap dari pada daerahnya tidak memiliki pemimpin, dari pada daerahnya tidak terurus, lebih baik yang ada saja.

Dengan adanya calon tunggal, berarti format pemilihanpun berubah. Format pemilihannya yaitu hanya memilih “Setuju” dan “Tidak Setuju”. Di sinilah seperti apa implementasi dari putusan tentang calon tunggal ini. Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Tasikmalaya, terlihat persentase partisipasi pemilih pada pemilukada sebelumnya lebih tinggi dari pada tahun 2015, dapat disebutkan mengalami penurunan partisipasi sebesar 5%. tinggal bagaimana implementasinya dilakukan. Dengan melihat data dari persentase pemilukada periode sebelumnya tercatat bahwa partisipasi pemilih mencapai angka 97% dan sisanya tidak berpartisipasi, sedangkan untuk periode 2015 tercatat bahwa partisipasi pemilih mencapai angka 92%. Sudah terlihat bahwa dengan adanya penetapan ini, partisipasi pemilih dalam pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya dengan calon tunggal mengalami penurunan sebesar 5% dari periode sebelumnya. Seperti di dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.**  
**Persentase Pemilukada tahun 2011 dan 2015**

<b>NO.</b>	<b>Klasifikasi Suara sah dan tidak sah pemilukada kab tasikmalaya 2011</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase partisipasi pemilih (%)</b>
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.	815.824	97%
2	Suara Tidak Sah	28.209	3%
3	Jumlah suara sah dan tidak sah	844.033	

*Sumber : Diolah sendiri dari data KPUD Kab. Tasikmalaya 2011*

<b>NO.</b>	<b>Klasifikasi Suara sah dan tidak sah pemilukada kab tasikmalaya 2015</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase partisipasi pemilih (%)</b>
1	Surat suara sah calon Bupati dan Wakil Bupati.	743.773	92%
2	Suara Tidak Sah	6.895	8%
3	Jumlah suara sah dan tidak sah	810.668	

Sumber : KPUD Kabupaten Tasikmalaya (diolah Peneliti), 2015

Keikutsertaan masyarakat dalam politik dan urusan pemerintahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak lagi melihat pemerintahan sebagai urusan orang lain yang secara kebetulan mempunyai kewenangan dan berhak untuk mengatur masyarakat. Mereka melihat urusan pemerintahan sebagai urusan mereka sendiri, sebagai bagian dari kehidupannya. Pada tahap awal penelitian, peneliti menemukan bahwa variabel Y (Partisipasi Pemilih) mengalami penurunan yang ditandai dengan dimensi : (1) Pemberian suara dalam pemilu, jelas bahwa pemberian suara menurun dari periode sebelumnya sekitar 5%. Terlihat dari data di atas bahwa pada tahun 2011 partisipasi terjadi sebesar 97%, sedangkan pada tahun 2015 partisipasi terjadi sebesar 92%; (2) Menghadiri rapat umum. Kurangnya diskusi formal yang dilakukan oleh individu-individu guna membahas suatu permasalahan. Karena diskusi ini dilakukan hanya ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan diberlangsungkan saja; (3) Hubungan dengan pejabat pemerintah, kurang terwujudnya komunikasi antara individu dengan individu dalam tingkatan pemerintah. Begitupun dengan tim sukses yang ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan ini tidak banyak karena calon hanya ada satu. (4)

Menjadi anggota partai politik, calon tunggal terjadi dikarenakan setiap partai politik tidak mengikutsertakan anggotanya untuk berpartisipasi dalam mencalonkan anggotanya untuk menjadi calon bupati. Terlihat bahwa hal ini kurang adanya rangsangan dan keterkaitan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah. Secara rinci Permasalahan yang terjadi adalah (1) Dengan adanya Keputusan Mahkamah Kostitusi tentang dibolehkannya calon tunggal dalam pemilukada khususnya di kabupaten Tasikmalaya, melahirkan kurang pahamnya masyarakat akan hal tersebut; (2) Hal ini mengakibatkan ketidak antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pemilukada. Karena baru kali ini terjadi hal seperti ini. (3) Tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan keputusan seperti ini, karena calon ini telah menjadi bupati di periode sebelumnya dan mungkin hasil yang dirasakannya tidak sesuai. Namun, ada juga yang setuju karena mereka menganggap dari pada daerahnya tidak memiliki pemimpin, dari pada daerahnya tidak terurus, lebih baik yang ada saja. (4) Dengan adanya calon tunggal, berarti format pemilihanpun akan berubah. Format pemilihannya yaitu hanya memilih “Setuju” dan “Tidak Setuju”. disinilah seperti apa implementasi dari putusan tentang calon tunggal ini; (5) Terlihat persentase partisipasi pemilih pada pemilukada sebelumnya lebih tinggi dari pada tahun 2015, dapat disebutkan mengalami penurunan partisipasi sebesar 5%.

Manfaat penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori mengenai implementasi kebijakan dan partisipasi pemilih dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang sebenarnya dalam proses pemilukada.

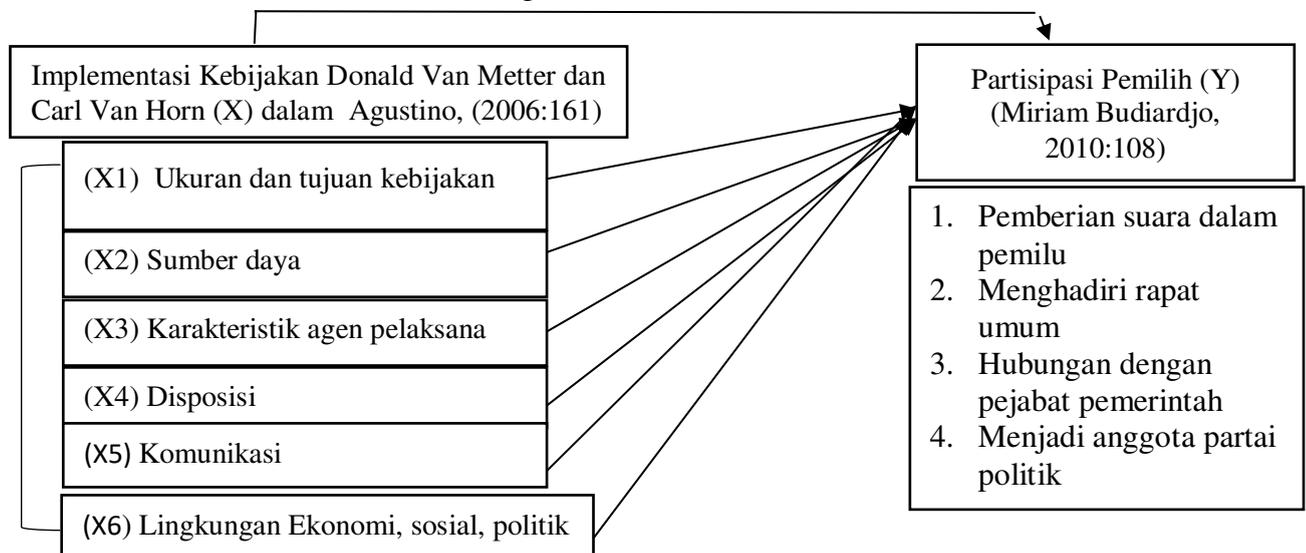
## **B. METODE PENELITIAN**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan, dimana teori ini dikembangkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Agustino, 2006:161) dan digunakan untuk meneliti dan mempelajari sebuah pelaksanaan kebijakan. Teori ini mengindikasikan bahwa dimensi-dimensi dari implementasi kebijakan atas penetapan calon tunggal berpengaruh atau tidak terhadap partisipasi politik dalam pemilukada. Teori lainnya yang digunakan adalah

yang dikembangkan oleh Miriam Budiardjo yaitu Partisipasi Pemilih (Miriam Budiardjo, 2002:108). Seperti digunakan dalam penelitian ini, berharap implementasi kebijakan penetapan calon tunggal mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilukada, sebab partisipasi politik akan tercapai jika diengaruhi oleh implementasi kebijakan atas penyelenggaraan pemilukada dengan menetapkan calon tunggal.

Untuk lebih memperjelas keterkaitan antar variabel maka dapat dijelaskan melalui gambar paradigma penelitian sebagai berikut :

Gambar 1  
kerangka Pemikiran



Pengaruh Ukuran dan tujuan (X1) terhadap partisipasi pemilih (Y) Hipotesis kausal merupakan pernyataan sementara tentang pengaruh antara satu variabel atau lebih variabel terhadap satu atau lebih variabel lain. Diantara variabel yang berhubungan tersebut tampak variabel sebab atau yang mmengaruhi dan variabel akibat yang dipengaruhi ( Silalahi, 2012:168)

1.
  - $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikansi dari ukuran dan tujuan (X1) terhadap partisipasi pemilih (Y)
  - $H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikansi dari ukuran dan tujuan (X1) terhadap partisipasi pemilih (Y)
2. Pengaruh Sumber daya (X2) terhadap partisipasi pemilih (Y)
  - $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikansi dari sumber daya (X2) terhadap partisipasi pemilih (Y)

- H<sub>a</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan dari sumber daya (X2) terhadap Partisipasi pemilih (Y)
3. Pengaruh Karakteristik agen pelaksana (X3) terhadap Partisipasi Pemilih (Y)
- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari karakteristik agen pelaksana (X3) terhadap partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>a</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan dari karakteristik agen pelaksana (X3) terhadap partisipasi pemilih(Y)
4. Pengaruh Disposisi (X4) terhadap Partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari disposisi (X4) terhadap partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>a</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan dari disposisi (X4) terhadap partisipasi pemilih (Y)
5. Pengaruh komunikasi (X5) terhadap Partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari komunikasi (X5) terhadap partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>a</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan dari komunikasi (X5) terhadap partisipasi pemilih (Y)
6. Pengaruh lingkungan ekonomi, sosial, politik (X5) terhadap Partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ekonomi, sosial, politik (X6) terhadap partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>a</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan dari ekonomi, sosial, politik (X6) terhadap partisipasi pemilih (Y)
7. Pengaruh implementasi kebijakan (X) terhadap Partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan (X) terhadap partisipasi pemilih (Y)
- H<sub>a</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan (X) terhadap partisipasi pemilih (Y).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dalam Sugiyono (2010: 7). Metode yang digunakan adalah metode Asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. dan bersifat *inferential* di bidang kebijakan publik yaitu metode penelitian untuk masalah-masalah yang aktual yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, Singarimbun dalam Engkus,(2017)

Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala, Sugiyono, (2013:11) .

## **1. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Menurut Sugiyono (2013: 80) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi pemilih pada pemilukada Kabupaten Tasikmalaya 2015.

Populasi dalam riset ini adalah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilukada tahun 2015. Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pemilih pada pemilukada tahun 2015 adalah 1.348.165 orang yang tersebar di 39 kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya.

### **b. Sampel**

Menurut Sugiyono (2013: 80), bahwa sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterlambatan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mawakili).

Untuk menentukan ukuran sampel penelitian ini akan menggunakan teknik *Cluster Random Sampling*. *Cluster Random Sampling* merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten (Sugiyono, 2013: 94).

Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas (negara) sampai ke wilayah terkecil (kabupaten). Setelah terpilih sampel terkecil, kemudian baru dipilih sampel secara acak. Dan akan diambil sampel sebanyak 50 sampel dari 8 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dengan perinciannya sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Jumlah Sampel**

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pemilih}}{N} \times n$	Responden
1	Cigalontang	55357	$\frac{55357}{281113} \times 50$	10
2	Leuwisari	29789	$\frac{29789}{281113} \times 50$	5
3	Mangunreja	28073	$\frac{28073}{281113} \times 50$	5
4	Padakembang	29070	$\frac{29070}{281113} \times 50$	5
5	Sariwangi	24691	$\frac{24691}{281113} \times 50$	4
6	Singaparna	51224	$\frac{51224}{281113} \times 50$	10
7	Sukarame	29847	$\frac{29847}{281113} \times 50$	5
8	Tanjung jaya	33062	$\frac{33062}{281113} \times 50$	6
<b>Jumlah</b>		281113		50

Sumber: Hasil Penelitian (diolah Peneliti),2015

Dan untuk target responden disini adalah mereka yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2015, yaitu (1) Warga negara Indonesia; (2) Berusia 17 tahun pada April 2014 yang lalu atau yang sudah menikah; (3) Bukan Polisi atau TNI.

## 2. Variabel dan Operasional Variabel

### a. Variabel Penelitian.

(a) Variabel Independen, yaitu suatu variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel ini juga sering disebut variabel stimulus. (Harbani Pasolong, 2012:92). Dalam kegiatan penelitian sering juga disebut dengan variabel bebas, variabel berpengaruh, variabel perubah dan variabel

X dan disini variabel independennya yaitu Implementasi Kebijakan. (b) Variabel Dependen, Sugiyono (2010: 39) mengatakan bahwa variabel dependen merupakan suatu variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel ini sering disebut sebagai variabel terikat, dan disini variabel dependennya yaitu partisipasi pemilih.

### b. Operasional Variabel

Secara teoretis, definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang variabel-variabel operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Definisi operasional yang akan dijelaskan penulis adalah pendidikan politik dan partisipasi politik.

**Tabel 3.**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No
1	2	3	4	5
<b>Bebas (Independent)</b>				
Implementasi Kebijakan (X) ( <i>Leo Agustino, 2006:161</i> )	Ukuran dan tujuan (X1)	a. Ukuran pemahaman penyelenggaraan pemilukada calon tunggal.	Likert	1
		b. Keberhasilan penyelenggaraan pemilukada calon tunggal	Likert	2
	Sumber Daya (X1)	a. Kemampuan implementor dalam penyelenggaraan pemilukada.	Likert	3
		b. Ketersediaan anggaran untuk memenuhi penyelenggaraan pemilukada	Likert	4
		c. Ketersediaan fasilitas	Likert	5
	Karakteristik agen pelaksana (X3)	a. Karakter pelaksana yang memiliki sikap jujur.	Likert	6
		b. Karakter pelaksana yang memiliki sikap komitmen.	Likert	7
		c. Karakter pelaksana yang memiliki sikap tegas.	Likert	8

Dipindahkan,

	Disposisi (X4)	a. Penerimaan yang diterima b. Penolakan yang diterima	Likert Likert	9 10
	Komunikasi (X5)	a. Komunikasi antara pelaksana dan pihak yang terlibat.	Likert	11
		b. Koordinasi antar pelaksanaan	Likert	12
Lingkungan ekonomi, sosial, politik (X6)	a. Lingkungan ekonomi	Likert	13	
	b. Lingkungan sosial	Likert	14	
	c. Lingkungan politik	Likert	15	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Terikat (Dependent)</b>				
Partisipasi Politik (Y) (Mirriam Budiardjo, 2002)	Pemberian suara dalam pemilu	a. Mengikuti proses pemberian suara	Likert	16
		b. Mengikuti sosialisasi	Likert	17
	Menghadiri rapat umum	a. Melakukan diskusi formal oleh pihak yang menggunakan vasilitas guna membahas suatu permasalahan.	Likert	18
b. Lokasi diskusi sebagai sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan.		Likert	19	
Hubungan dengan pejabat pemerintah		a. Komunikasi antar individu	Likert	20
		b. Tim sukses dalam mensukseskan kegiatan pemilu	Likert	21
		c. Demonstrasi adalah sikap anarkis ketika aspirasi belum terpenuhi yang dilakukan oleh individu atau kelompok.	Likert	22

	Menjadi anggota partai politik	a. Simpatisan yang tertarik pada pihak lain karena adanya dorongan.	Likert	23
		b. Partisan adalah perilaku yang muncul dengan adanya pemikiran terhadap seseorang dari lingkungan luar.	Likert	24

**Sumber: Hasil Penelitian (diolah Peneliti), 2015**

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini: (1) Studi Pustaka, dalam melakukan penelitian ini dilakukan studi pustaka guna memberikan wawasan dan pengarahan dalam mengkaji permasalahan yang ada secara sistematis. Dengan ini peneliti mengumpulkan buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan data lainnya agar dapat membantu dalam hasil penelitian ini. (2) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat atau bahkan mengabadikan suatu laporan yang sudah tersedia, Ahmad Tanzeh (2009: 57). Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dalam pokok permasalahan yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa berupa data-data dari KPUD setempat ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. (3) Daftar pertanyaan/Angket (Kuesioner), daftar pertanyaan (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analisis untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih. Daftar pertanyaan ini kemudian akan dibagikan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji korelasi parsial digunakan untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara sendiri-sendiri atau Parsial. Uji ini digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas (X) benar-benar memberikan kontribusi terhadap variabel terikat (Y). Kaidah Pengujian (Riduwan, 2013: 234). Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Apabila nilai signifikansi lebih dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis, yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9,496	2,032		-4,674	,000
x1	,137	,243	,039	,565	,575
x2	,368	,224	,097	1,640	,108
x3	1,260	,252	,402	5,003	,000
x4	,980	,210	,275	4,673	,000
x5	1,504	,373	,291	4,035	,000
x6	,319	,164	,114	1,950	,058

a. Dependent Variable: y

Sumber : Hasil Pengolahan Relibilitas Menggunakan Spss 23.0 2017

Dari tabel di atas, didapat informasi:

1) Pengaruh ukuran dan tujuan ( $X_1$ ) terhadap partisipasi pemilih (Y)

Berdasarkan tabel diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,565. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan  $df (50-6-1) = 43$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi= 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,016. Oleh karena itu nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $0,565 < 2,016$ ) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara ukuran dan tujuan kebijakan tentang penetapan calon tunggal dengan Partisipasi pemilih.

2) Pengaruh sumber daya ( $X_2$ ) terhadap partisipasi pemilih (Y)

Berdasarkan tabel diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,640. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan  $df (50-6-1) = 43$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi= 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,016. Oleh karena itu nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1,640 < 2,016$ ) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial tidak ada

pengaruh signifikan antara sumber daya kebijakan tentang penetapan calon tunggal dengan Partisipasi pemilih.

3) Pengaruh karakteristik agen pelaksana ( $X_3$ ) terhadap partisipasi pemilih (Y)

Berdasarkan tabel diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 5,003. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan  $df (50-6-1) = 43$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi= 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,016. Oleh karena itu nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,003 > 2,016$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara karakteristik agen pelaksana kebijakan tentang penetapan calon tunggal dengan Partisipasi pemilih.

4) Pengaruh disposisi ( $X_4$ ) terhadap partisipasi (Y)

Berdasarkan tabel diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,673. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan  $df (50-6-1) = 43$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi= 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,016. Oleh karena itu nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,673 > 2,016$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara disposisi kebijakan tentang penetapan calon tunggal dengan Partisipasi pemilih.

5) Pengaruh Komunikasi ( $X_5$ ) terhadap partisipasi (Y)

Berdasarkan tabel diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,035. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan  $df (50-6-1) = 43$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi= 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,016. Oleh karena itu nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,035 > 2,016$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara komunikasi kebijakan tentang penetapan calon tunggal dengan Partisipasi pemilih.

6) Pengaruh lingkungan ( $X_6$ ) terhadap partisipasi (Y)

Berdasarkan tabel diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,950. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan  $df (50-6-1) = 43$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi= 0,025) hasil

diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,016. Oleh karena itu nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1,950 < 2,016$ ) maka  $H_0$  diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara lingkungan kebijakan tentang penetapan calon tunggal dengan Partisipasi pemilih.

Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama, yakni untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dari variabel X implementasi kebijakan terhadap variabel Y kualitas pelayanan. Maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus SPSS koefisien korelasi secara bersama-sama sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Hasil Analisis Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	972,901	6	162,150	70,586	,000 <sup>b</sup>
Residual	98,779	43	2,297		
Total	1071,680	49			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x6, x4, x5, x2, x1, x3

Sumber : Hasil Pengolahan Relibilitas Menggunakan Spss 23.0 2017

Diperoleh nilai  $F_{hitung}$ , untuk model regresi yang digunakan sebesar 70,589. Untuk memperoleh  $F_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 5\%$ ,  $df_1 (6-1) = 5$ , dan  $df_2 (50-6-1) = 43$ , hasil diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 2,43. Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $70,589 > 2,43$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan sikap dimensi terhadap partisipasi pemilih.

(Pengujian secara simultan  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$  terhadap Y dari tabel diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 70,589 dengan nilai probabilitas (signifikansi) = 0,000. Nilai  $F_{hitung} 70,589 > F_{tabel} 2,43$  dan nilai signifikansi < dari nilai probabilitas 0,05. Maka  $H_0$  ditolak, berarti secara bersama-sama atau simultan ukuran dan tujuan, sumber daya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi dan

lingkungan kebijakan Penetapan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah berpengaruh terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian dari implementasi kebijakan penetapan calon tunggal terhadap partisipasi pemilih dapat dijelaskan bahwa dari hasil pengujian validitas data yang dimana sebagai alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, valid berarti instrumen yang digunakan tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Dari hasil pengukuran data yang diperoleh dari implementasi kebijakan maupun dari partisipasi pemilih merupakan data yang valid yakni dimana  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{kritis}$  0,30. Sehingga instrumen yang digunakan layak untuk digunakan kepenelitian selanjutnya.

Selanjutnya untuk pengukuran reliabilitas yang tujuannya untuk menunjukkan ke stabilan dan ke konsistensi alat ukur dalam mengukur konsep suatu yang akan di ukur. Dari hasil pengujian maka alat ukur yang digunakan dari implementasi kebijakan maupun partisipasi pemilih merupakan data yang reliabel yang dimana keandalannya lebih dari 0,60.

Berdasarkan analisis regresi berganda yaitu suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan variabel terikat. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa nilai ukuran dan tujuan sebesar 0,565, sumberdaya sebesar 1,640, karakter agen pelaksana sebesar 5,003, disposisi sebesar 4,673, komunikasi sebesar 4,035 dan lingkungan sebesar 1,950. Maka apabila nilai hasil dari implementasi kebijakan yakni dari ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan naik nilai satu-satuan dari implementasi kebijakan atau variabel x maka partisipasi pemilih pun akan naik sebesar dari nilai analisis yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  untuk dimensi ukuran dan tujuan sebesar 0,565 yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa ukuran dan tujuan tidak mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  untuk dimensi sumber daya sebesar 1,640 yang lebih kecil dari

nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa sumberdaya tidak mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.

Kemudian hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi karakter agen pelaksana sebesar 5,003 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa karakter agen pelaksana mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi disposisi sebesar 4,673 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa disposisi mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi komunikasi sebesar 4,035 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa komunikasi mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. Dan hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi lingkungan sebesar 1,950 yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa lingkungan tidak mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan.

Kemudian diperoleh nilai  $F_{hitung}$  untuk model regresi yang digunakan sebesar 70,586 hasil diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 2,43. Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $70,586 > 2,43$ ), maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya untuk pengujian koefisien determinasi yakni digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kata lain beberapa persen variabel X dapat diterangkan oleh variabel Y

secara bersama-sama. Implementasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya dalam persentase. Dari hasil analisis regresi, bahwa angka  $R^2$  (Rsquare) sebesar 0,908 atau 90,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu implementasi kebijakan (variabel x) terhadap variabel dependen yaitu partisipasi pemilih (variabel y) sebesar 90,8% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam dimensi (ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan) mampu menjelaskan sebesar 90,8% variasi variabel dependen yaitu partisipasi pemilih. Sedangkan sisanya sebesar 9,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 90,8% termasuk kedalam kriteria sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang sangat tinggi dari pengaruh implementasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan calon tunggal memiliki peran yang penting dalam terwujudnya partisipasi pemilih.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implikasi Implementasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. Maka peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut : (1) Perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  untuk dimensi ukuran dan tujuan sebesar 0,565 yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa ukuran dan tujuan tidak mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. (2) Hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  untuk dimensi sumber daya sebesar 1,640 yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa sumberdaya tidak mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. (3) Kemudian hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi karakter agen pelaksana sebesar 5,003 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa karakter agen pelaksana

mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. (4) Hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi disposisi sebesar 4,673 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa disposisi mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. (5) Hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi komunikasi sebesar 4,035 yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa komunikasi mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. (6) Dan hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi lingkungan sebesar 1,950 yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  2,016, dengan demikian hasil uji hipotesis terbukti, bahwa lingkungan tidak mempengaruhi variabel Y yaitu partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. (7) Hasil perhitungan yang diperoleh  $t_{hitung}$  dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan pembahasan yang meliputi hasil penyebaran angket yang peneliti lakukan dan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti menyampaikan sumbangan pemikiran berupa saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan sebagai masukan untuk kelanjutan proses Implementasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.

Dikarenakan masih belum optimalnya beberapa indikator dari dimensi implementasi kebijakan seperti karakter agen pelaksana penyelenggara yang secara langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat partisipasi, lalu dalam komunikasi dan cara pelaksana memberikan sikap dalam menerima hasil dari penyelenggaraan yang belum sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

- Agustino, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI Bandung.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi 2*, Jakarta : Salemba Humanika.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Partisipasi Politik dan Partai Politik*, Jakarta : Gramedia
- Widiarjana Indonesia------. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana.
- Engkus. (2017). Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *LITIGASI*. [Online] 18(1), 2442-2272. Available from:doi:pISSN 0853-7100, e-ISSN:2442-2274.
- Harahap. Abdul Asri. (2005). *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Jakarta : Cidesindo
- Keban. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta : Gava Media.
- Michael Rush dan Philip Althoff. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Mubarok, M. Mufti. (2005). *Sukses Pilkada Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*, Surabaya : Java Pustaka Media Utama.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*, Jakarta : Grasindo.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*, Bandung. Alfabeta.
- Rakhmat. Jalaluddin.(2006). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Samuel. P. Huntington dan Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Rafika Aditama.
- Sorensen, George. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharizal.(2012). *Pemilukada; Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Suparman, N. (2017) Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.[Online]. Available from:doi:10.24258/jba.v13.274.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widya Sarana
- Syafiie, Inu Kencana. (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, : Refika Aditama
- Tanzeh. Ahmad. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Penebit Teras.
- Thoah. (2005). *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan, Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara.

### **Skripsi/Penelitian Sejenis**

- Roni, Effendi. (2013). Pengaruh Sosialisasi Pemilukada KPUD Provinsi Jawa barat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bandung pada Pilgub Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2018.( Skripsi).Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Novita, Polina Sitompul. (2007). Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara Medan.

### **Perundang-Perundangan.**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.